

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria untuk dipenuhi seperti yang telah ditetapkan pada Bab III. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada ketersediaan data laporan keuangan daerah yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan kriteria penyaringan data yang telah ditentukan, diperoleh jumlah objek penelitian yang memenuhi syarat secara konsisten selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebanyak 33 Kabupaten/Kota. Rincian dari pengambilan sampel dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah Wilayah
1.	Jumlah Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.	35
2.	Kabupaten dan Kota berada di Provinsi Jawa Tengah yang Laporan APBD dan Realisasi APBD tersedia pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) secara berturut-turut selama periode penelitian yaitu tahun 2020-2024.	34
3.	Kabupaten dan Kota berada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki data lengkap mengenai target dan realisasi berkaitan dengan variabel penelitian yaitu PAD, PBB-P2, dan PBJT selama periode penelitian, tahun 2020-2024.	33
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria		33
Total observasi (33 x 5 tahun)		165

Sumber : Data diolah, 2026

Objek penelitian terdiri atas tiga variabel utama yaitu PBB-P2 (X_1) dan PBJT (X_2) sebagai variabel independen, serta PAD (Y) sebagai variabel dependen. Ketiga variabel tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah dan dianalisis menggunakan pendekatan data panel yang menggabungkan dimensi *cross-section* (33 wilayah) dengan dimensi *time series* (tahun 2020 sampai dengan 2024).

4.2 Analisis Efektivitas

Sebelum menguji data menggunakan rumus statistik di Stata 17, peneliti akan menganalisis kinerja keuangan daerah secara nyata menggunakan rasio efektivitas. Analisis rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa mampu pemerintah daerah dalam meraih dan merealisasikan target penerimaan PBB-P2 dan PBJT yang telah ditetapkan dalam anggaran. Penentuan performa efektivitas menggunakan standar kriteria yang telah ditulis dalam Bab III.

Tabel 4.2
Rasio Efektivitas PBB-P2

NO	NAMA	RASIO EFEKTIVITAS PBB-P2					RATA-RATA	KRITERIA
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Kab. Banjarnegara	103%	102%	101%	98%	102%	101%	Sangat Efektif
2	Kab. Banyumas	101%	90%	77%	79%	92%	88%	Cukup Efektif
3	Kab. Batang	108%	79%	71%	145%	122%	105%	Sangat Efektif
4	Kab. Blora	95%	101%	103%	99%	110%	102%	Sangat Efektif
5	Kab. Boyolali	125%	108%	99%	107%	101%	108%	Sangat Efektif

NO	NAMA	RASIO EFEKTIVITAS PBB-P2					RATA-RATA	KRITERIA
		2020	2021	2022	2023	2024		
6	Kab. Brebes	95%	102%	102%	99%	94%	99%	Efektif
7	Kab. Cilacap	104%	103%	102%	102%	137%	110%	Sangat Efektif
8	Kab. Demak	105%	101%	97%	99%	90%	99%	Efektif
9	Kab. Jepara	110%	135%	109%	96%	94%	109%	Sangat Efektif
10	Kab. Karanganyar	103%	101%	103%	107%	106%	104%	Sangat Efektif
11	Kab. Kebumen	103%	103%	109%	103%	102%	104%	Sangat Efektif
12	Kab. Kendal	86%	88%	35%	47%	96%	70%	Kurang Efektif
13	Kab. Klaten	91%	125%	112%	130%	123%	116%	Sangat Efektif
14	Kab. Magelang	96%	120%	125%	107%	103%	110%	Sangat Efektif
15	Kab. Pati	107%	114%	106%	106%	114%	110%	Sangat Efektif
16	Kab. Pekalongan	87%	70%	102%	86%	93%	88%	Cukup Efektif
17	Kab. Pemalang	100%	142%	111%	113%	101%	113%	Sangat Efektif
18	Kab. Purbalingga	107%	104%	104%	102%	101%	104%	Sangat Efektif
19	Kab. Purworejo	110%	118%	111%	112%	104%	111%	Sangat Efektif
20	Kab. Rembang	107%	107%	113%	107%	92%	105%	Sangat Efektif
21	Kab. Semarang	117%	108%	79%	81%	87%	94%	Efektif
22	Kab. Sragen	131%	119%	124%	139%	111%	125%	Sangat Efektif

NO	NAMA	RASIO EFEKTIVITAS PBB-P2					RATA-RATA	KRITERIA
		2020	2021	2022	2023	2024		
23	Kab. Sukoharjo	99%	111%	120%	129%	131%	118%	Sangat Efektif
24	Kab. Tegal	89%	100%	106%	96%	104%	99%	Efektif
25	Kab. Temanggung	64%	103%	103%	102%	109%	96%	Efektif
26	Kab. Wonogiri	103%	105%	101%	101%	102%	102%	Sangat Efektif
27	Kab. Wonosobo	101%	103%	103%	104%	100%	102%	Sangat Efektif
28	Kota Magelang	104%	130%	108%	106%	112%	112%	Sangat Efektif
29	Kota Pekalongan	92%	109%	109%	108%	99%	103%	Sangat Efektif
30	Kota Salatiga	104%	108%	105%	105%	96%	103%	Sangat Efektif
31	Kota Semarang	98%	95%	98%	97%	96%	97%	Efektif
32	Kota Surakarta	83%	119%	97%	89%	80%	93%	Efektif
33	Kota Tegal	93%	97%	102%	92%	100%	97%	Efektif

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.2 dapat dilihat kinerja pengelolaan PBB-P2 pada 33 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2020-2024 menunjukkan hasil secara umum sangat positif dengan rata-rata berada pada tingkat sangat efektivitas. Tabel tersebut menunjukkan dalam rata-rata capaian selama lima tahun, terdapat 22 daerah yang berhasil meraih predikat “Sangat Efektif”, kemudian diikuti oleh 8 daerah dengan predikat “Efektif”, 2 daerah predikat “Cukup Efektif” yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Pekalongan,

dan terakhir hanya terdapat 1 daerah dengan predikat “Kurang Efektif” yaitu Kabupaten Kendal dengan persentase 70%. Kabupaten Kendal menjadi daerah dengan kinerja pengelolaan PBB-P2 terendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Khususnya pada tahun 2022 di mana rasio efektivitas merosot tajam hingga menyentuh angka 35% dan tergolong tidak efektif. Penurunan yang sangat ekstrem ini menunjukkan adanya indikasi kendala struktural seperti penetapan target anggaran tahunan yang terlalu tinggi tanpa adanya perluasan objek pajak atau kendala teknis proses pemungutan pajak pasca-pandemi.

Tabel 4.3
Rasio Efektivitas PBJT

NO	NAMA	RASIO EFEKTIVITAS PBJT					RATA-RATA	KRITERIA
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Kab. Banjarnegara	86%	82%	106%	117%	111%	101%	Sangat Efektif
2	Kab. Banyumas	62%	59%	78%	79%	77%	71%	Kurang Efektif
3	Kab. Batang	90%	115%	127%	105%	112%	110%	Sangat Efektif
4	Kab. Blora	90%	106%	128%	124%	121%	114%	Sangat Efektif
5	Kab. Boyolali	91%	100%	120%	114%	118%	109%	Sangat Efektif
6	Kab. Brebes	91%	99%	123%	104%	98%	103%	Sangat Efektif
7	Kab. Cilacap	91%	89%	111%	124%	115%	106%	Sangat Efektif
8	Kab. Demak	93%	95%	112%	111%	123%	107%	Sangat Efektif
9	Kab. Jepara	92%	120%	108%	81%	104%	101%	Sangat Efektif
10	Kab. Karanganyar	96%	104%	125%	123%	124%	115%	Sangat Efektif
11	Kab. Kebumen	93%	116%	129%	117%	112%	113%	Sangat Efektif
12	Kab. Kendal	88%	98%	107%	107%	114%	103%	Sangat Efektif

NO	NAMA	RASIO EFEKTIVITAS PBJT					RATA-RATA	KRITERIA
		2020	2021	2022	2023	2024		
13	Kab. Klaten	91%	109%	128%	133%	143%	121%	Sangat Efektif
14	Kab. Magelang	80%	133%	139%	121%	122%	119%	Sangat Efektif
15	Kab. Pati	93%	99%	122%	125%	132%	114%	Sangat Efektif
16	Kab. Pekalongan	85%	93%	107%	101%	118%	101%	Sangat Efektif
17	Kab. Pemalang	93%	111%	117%	106%	108%	107%	Sangat Efektif
18	Kab. Purbalingga	94%	103%	132%	109%	108%	109%	Sangat Efektif
19	Kab. Purworejo	105%	101%	110%	119%	96%	106%	Sangat Efektif
20	Kab. Rembang	91%	97%	95%	77%	115%	95%	Efektif
21	Kab. Semarang	71%	84%	108%	88%	103%	91%	Efektif
22	Kab. Sragen	94%	134%	142%	124%	132%	125%	Sangat Efektif
23	Kab. Sukoharjo	110%	109%	129%	123%	139%	122%	Sangat Efektif
24	Kab. Tegal	95%	101%	125%	79%	95%	99%	Efektif
25	Kab. Temanggung	100%	123%	136%	116%	112%	117%	Sangat Efektif
26	Kab. Wonogiri	107%	113%	132%	128%	139%	124%	Sangat Efektif
27	Kab. Wonosobo	100%	122%	140%	129%	122%	123%	Sangat Efektif
28	Kota Magelang	85%	102%	135%	132%	108%	112%	Sangat Efektif
29	Kota Pekalongan	78%	88%	111%	108%	105%	98%	Efektif
30	Kota Salatiga	76%	87%	117%	137%	127%	109%	Sangat Efektif
31	Kota Semarang	58%	56%	70%	95%	86%	73%	Kurang Efektif
32	Kota Surakarta	73%	92%	89%	99%	102%	91%	Efektif
33	Kota Tegal	77%	71%	91%	89%	91%	84%	Cukup Efektif

Sumber : Data diolah, 2026

Tabel 4.3 menyajikan kinerja pengelolaan penerimaan realisasi PBJT dari tahun ke tahun yang menunjukkan perubahan yang naik turun, terutama pada tahun 2020 hingga 2021 pada masa pandemi. Tahun 2020-2021 mencatat efektivitas yang rendah diakibatkan karena adanya pandemi dan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial yang berdampak pada sektor konsumsi seperti hotel, restoran, dan hiburan, sehingga hal ini berdampak pada penerimaan PBJT yang menurun karena bergantung pada aktivitas konsumsi masyarakat. Kemudian di beberapa tahun terakhir 2023 hingga 2024 mengalami pemulihan dengan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, karena masa pandemi telah berakhir. Pada tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian dalam lima tahun terakhir secara umum tergolong “Sangat Efektif” dengan rincian sebagai berikut terdapat 25 daerah berhasil mendapat predikat “Sangat Efektif.” Selanjutnya untuk predikat “Efektif” terdapat 5 daerah, 1 daerah yaitu Kota Tegal dengan predikat “Cukup Efektif”, dan terakhir predikat “Kurang Efektif” terdapat 2 daerah yaitu Kabupaten Banyumas dan Kota Semarang.

4.3 Statistika Deskriptif

Tahapan awal yang dilakukan sebelum melakukan pengujian regresi data panel dengan menyajikan gambaran umum mengenai karakteristik data melalui statistik deskriptif. Hasil pengolahan statistik deskriptif terhadap 165 observasi disajikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif (dalam jutaan rupiah)

Variabel	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
X1 (PBB-P2)	165	54.225,88	92.908,08	6.344,13	633.305,12
X2 (PBJT)	165	80.280,04	105.689,10	17.332,41	816.815,42
Y (PAD)	165	486.345,90	391.349,90	219.539,40	2.885.774,30

Sumber : Data diolah melalui Stata 17, 2026

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel (X_1) PBB-P2 memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 54.225,88 juta dengan standar deviasi sebesar Rp 92.908,08 juta. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata mengindikasikan adanya variasi atau kesenjangan yang cukup tinggi pada penerimaan PBB-P2 antarwilayah maupun antartahun yang diamati, dengan nilai realisasi terendah sebesar Rp 6.344,13 juta yang dimiliki oleh wilayah Kota Magelang di tahun 2020 dan nilai realisasi tertinggi sebesar Rp 633.305,12 juta dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2023. Kesenjangan tersebut diduga adanya perbedaan basis objek pajak seperti luas dan nilai bumi/bangunan.

Kemudian variabel kedua yaitu PBJT (X_2) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 80.280,04 juta dengan standar deviasi sebesar Rp 105.689,10 juta. Sementara nilai realisasi terendah sebesar Rp 17.332,41 juta berada di wilayah Kab. Wonosobo pada tahun 2020 dan nilai realisasi tertinggi sebesar Rp 816.815,422 juta berada di wilayah Kota Semarang pada tahun 2024. Seperti halnya pada variabel X_1 , besarnya standar deviasi dibandingkan nilai rata-rata pada variabel X_2 juga menunjukkan tingkat heterogenitas yang tinggi karena gabungan dari banyak wilayah dengan karakteristik berbeda-beda seperti aktivitas ekonomi, pariwisata, dan konsumsi masyarakat.

Sementara, untuk variabel selanjutnya yaitu PAD (Y) sebagai variabel dependen memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 486.345,90 juta dengan standar deviasi sebesar Rp 391.349,90 juta. Nilai terendah penerimaan PAD berada di wilayah Kota Salatiga tahun 2020 yaitu sebesar Rp 219.539,40 juta dan nilai tertinggi berada di Kota Semarang tahun 2024 yaitu sebesar Rp 2.885.774,30 juta. Rentang nilai yang sangat lebar antara nilai terendah dengan tertinggi menunjukkan adanya kesenjangan fiskal yang signifikan antarwilayah dalam kemampuan menghimpun PAD.

4.4 Hasil Analisis Data

4.4.1 Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Sebelum melakukan analisis regresi data panel maupun uji asumsi klasik, terlebih dahulu melakukan pengujian pemilihan model data panel yang paling tepat. Pemilihan ini dilakukan dengan uji Chow, uji *Lagrange Multiplier* (LM), dan uji Hausman. Berikut langkah pemilihan dengan melakukan tiga pengujian.

4.4.1.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang lebih tepat antara CEM dan FEM dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Model CEM lebih tepat digunakan

H1 : Model FEM lebih tepat digunakan

Apabila nilai Prob *Cross-section F* < 0,005 maka H0 ditolak, sehingga model yang dipilih FEM. Hasil uji disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
F	14,13	32,130	0,000

Sumber : Data diolah melalui Stata 17, 2026

Hasil pengujian menunjukkan nilai F untuk efek wilayah sebesar 14,13 dengan Prob = 0,000. Nilai sig. yang dihasilkan jauh lebih kecil dari taraf yang ditentukan ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Secara statistik dari hasil tersebut menunjukkan terdapat efek spesifik karakteristik unik antarobjek dalam penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode FEM lebih tepat dibandingkan dengan CEM.

4.4.1.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang lebih tepat antara FEM dan REM dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model REM lebih tepat digunakan

H_1 : Model FEM lebih tepat digunakan

Apabila nilai Prob *Cross-section F* $< 0,005$ maka H_0 ditolak, sehingga model yang dipilih FEM. Hasil uji disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Prob.
Hausman test	10,06	0,0065

Sumber : Data diolah melalui Stata 17, 2026

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 4.7, diperoleh nilai statistik *Chi-Sq* sebesar 10,06 dengan Prob $> \chi^2$ sebesar 0,0065, di mana lebih kecil dari

yang telah ditentukan yaitu 0,05 ($0,0065 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya hasil tersebut menunjukkan model yang paling tepat yaitu FEM dalam penelitian ini.

4.4.1.3 Uji *Lagrange Multiplier*

Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan apabila hasil Uji Chow memilih CEM dan perlu dipastikan kembali dibandingkan REM, atau sebagai pelengkap pengujian. Hasil hipotesis pengujian sebagai berikut:

H_0 : Model CEM lebih tepat digunakan

H_1 : Model REM lebih tepat digunakan

Jika nilai $\text{Prob} > \text{chibar}^2 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan artinya H_1 diterima yaitu model REM lebih tepat.

Tabel 4.7
Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

Pengujian	Chibar-Square	Prob > chibar2
LM test	157,28	0,000

Sumber : Data diolah melalui Stata 17, 2026

Hasil uji Tabel 4.6 diperoleh nilai statistik *Chibar-Square* sebesar 157,28 dengan $\text{Prob} > \text{chibar}^2$ sebesar 0,000 artinya nilai yang dihasilkan jauh lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa metode REM merupakan model lebih tepat jika dibandingkan dengan CEM.

4.4.1.4 Model Estimasi Terpilih

Berdasarkan hasil rangkaian Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier* model estimasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect*

Model (FEM). Model inilah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar interpretasi hasil regresi data panel pada penelitian ini.

4.4.2 Uji Asumsi Klasik

4.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual model berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan Uji *Shapiro Wilk* dengan kriteria nilai probabilitas $> 0,05$ menunjukkan residual berdistribusi normal.

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas Awal

Variabel	Obs	W	V	z	Prob > z
Residu	165	0,91084	11,260	5,516	0,00000

Sumber : Data diolah melalui Stata 17, 2026

Hasil uji dengan Uji *Shapiro Wilk* menghasilkan nilai statistik dengan Prob $> z = 0,00000$ yang artinya nilai jauh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat diartikan bahwa residual model regresi tidak berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2021) salah satu cara untuk menormalkan data dapat dilakukan dengan transformasi data dalam bentuk Logaritma natural (Ln). Hasilnya diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas Transformasi Logaritma Natural

Variabel	Obs	W	V	z	Prob > z
Residu	165	0,97380	3,309	2,726	0,00320

Sumber : Data diolah melalui Stata 17, 2026

Uji normalitas setelah transformasi Ln dengan metode Uji *Shapiro Wilk* menghasilkan nilai Prob $> z = 0,00320$. Nilai tersebut masih jauh lebih kecil dari 0,05 sehingga diartikan data tidak berdistribusi normal. Meskipun asumsi

normalitas secara formalitas tidak terpenuhi, hal ini tidak merusak validitas model regresi panel. Pernyataan tersebut didukung oleh *Central Limit Theorem* dalam Gujarati & Porter (2009) yaitu ketika sampel dalam penelitian tergolong besar ($N > 100$), asumsi normalitas tidak lagi menjadi syarat mutlak karena distribusi estimasi parameter akan mendekati normal dengan sendirinya.

4.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi antarvariabel independen atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Model dikatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 .

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
LnX1	3,21	0,311704
LnX2	3,21	0,311704
Mean VIF	3,21	

Sumber : Data diolah melalui Stata 17, 2026

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.7, nilai VIF untuk variabel LnX1 yaitu PBB-P2 sebesar 3,21 dan variabel LnX2 yaitu PBJT sebesar 3,21. Kedua variabel independen secara individu memiliki nilai VIF yang jauh lebih kecil dari batas maksimum 10. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antarvariabel dalam model regresi panel yang diperoleh setelah transformasi Ln.

4.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode *Group Heteroskedasticity* melalui Uji *Modified Wald* (xttest3) pada aplikasi Stata 17 dengan kriteria nilai $\text{Prob} > \chi^2 > 0,05$ menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Modified Wald Test*)

chi2 (33)	375,12
Prob > chi2	0,0000

Sumber : Data diolah melalui Stata 17, 2026

Hasil output pada Tabel 4.8, nilai statistik $\text{Prob} > \chi^2$ menunjukkan sebesar 0.0000, artinya nilai tersebut lebih kecil dari kriteria yang telah ditetapkan yaitu 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini mengalami masalah heteroskedastisitas *groupwise* dalam model. Atas permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penyembuhan ekonometrika untuk menyelamatkan model regresi data panel menggunakan *Robust White Standard Errors* (Gujarati & Porter, 2009). Dengan menggunakan *Robust White Standard Errors*, nilai koefisien regresi tidak berubah karena koefisien tetap konsisten. Metode ini hanya memperbaiki akurasi standar erornya yang terganggu oleh heteroskedastisitas, sehingga nilai t-statistik dan p-value menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan untuk pengujian hipotesis.

4.4.2.4 Uji Autokorelasi

Model estimasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan data panel, maka pengujian autokorelasi dilakukan dengan *Wooldridge test* melalui perintah xtserial pada Stata 17. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini

didasarkan pada nilai sig. Prob > F 0,05 dikatakan tidak terdapat masalah autokorelasi. Hasil pengujian terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12
Hasil Uji Autokorelasi

Nilai Statistik F (1, 32)	1,390
Prob > F	0,2471

Sumber : Data diolah melalui Stata 17, 2026

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, diperoleh nilai statistik F sebesar 1,390 dengan Prob > F sebesar 0,2471 yang artinya nilai yang dihasilkan jauh lebih besar dari yang telah ditentukan ($0,2471 > 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi di dalam model regresi penelitian ini.

4.4.3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pemilihan model yang telah dilakukan, maka diperoleh model estimasi dalam penelitian ini yaitu FEM dengan *Robust White Standard Erros*. Setelah diketahui model yang terpilih dapat melakukan regresi data panel. Hasil regresi tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.13
Hasil Regresi Data Panel dengan model FEM

Dependent : LnY (PAD)				
Variabel	Coefficient	Robust Std. Error	t-Statistic	Prob
LnX1 (PBB-P2)	,0427752	,0834927	0,51	0,612
LnX2 (PBJT)	,3443809	,0548569	6,28	0,000
Cons	17,20147	1,254365	13,71	0,000

Sumber : Data diolah melalui Stata 17, 2026

Hasil regresi di atas dapat dituliskan persamaan model regresi sebagai berikut.

$$\mathbf{LnY = \beta_0 + \beta_1 LnX_1 + \beta_2 LnX_2 + e}$$

Keterangan:

$\mathbf{LnY}$ = Variabel Dependen (PAD)

β_0 = Konstanta Regresi

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

$\mathbf{LnX_1}$ = PBB-P2

$\mathbf{LnX_2}$ = PBJT

$\mathbf{e}$ = standard error

Regresi yang telah dilakukan, akan menghasilkan persamaan regresi menjadi:

$$\mathbf{LnY = 17,20147 + 0,0427752 LnX_1 + 0,3443809 LnX_2 + e}$$

Penjelasan dari persamaan regresi di atas:

1. Pada persamaan regresi, diperoleh nilai konstanta sebesar 17,20147. Artinya apabila PBB-P2 ($\mathbf{LnX_1}$) dan PBJT ($\mathbf{LnX_2}$) bernilai konstan (mendekati titik dasar), maka nilai PAD berada pada level dasar sebesar 17,20147.
2. Pada variabel PBB-P2 diketahui koefisien $\mathbf{LnX_1}$ sebesar 0,0427752. Koefisien tersebut menunjukkan arah positif, artinya kenaikan 1% pada penerimaan PBB-P2 maka PAD akan mengalami kenaikan sebesar 0,0428%. Namun, karena pengujian nilai probabilitas (0,612) jauh lebih besar dari 0,05, sehingga secara

statistik dapat disimpulkan bahwa PBB-P2 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.

3. Pada variabel PBJT diketahui koefisien LnX2 sebesar 0,3443809. Tanda koefisien ini menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel PBJT dengan PAD. Artinya, bahwa setiap ada peningkatan pada PBJT sebesar 1% maka akan langsung mendorong peningkatan pada PAD sebesar 0,344%. Selain itu, nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 secara statistik menunjukkan bahwa PBJT memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.

4.4.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini terjawab dengan hasil olah data yang telah dilakukan. Berikut hasil uji hipotesis:

Tabel 4.14
Hasil Uji Hipotesis dan Kelayakan Model

R-squared :

Within = 0,4431

Between = 0,8141

Overall = 0,7811

Prob > F = 0,0000

LnY (PAD)	Coefficient	Robust Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
LnX1 (PBB-P2)	,0427752	,0834927	0,51	0,612	Tidak Signifikan
LnX2 (PBJT)	,3443809	,0548569	6,28	0,000	Signifikan
Cons	17,20147	1,254365	13,71	0,000	

Sumber : Data diolah melalui Stata 17, 2026

4.4.4.1 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara sendiri-sendiri terhadap variabel Y. Pada penelitian ini dapat dijabarkan hasil uji yang telah dilakukan terkait masing-masing variabel:

1. PBB-P2

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, variabel PBB-P2 ($\ln X_1$) menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,0427752. Nilai tersebut bertanda positif yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PBB-P2 dan PAD searah, sesuai dengan pernyataan hipotesis yang diajukan yaitu positif. Namun, hasil pengujian nilai Prob. sebesar 0,612 yang berada jauh di atas 0,05 ($0,612 > 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan positif tidak terbukti secara nyata (tidak signifikan) secara statistik. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan PBB-P2 berpengaruh terhadap PAD ditolak. Artinya dalam periode penelitian perubahan atau peningkatan penerimaan PBB-P2 belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD.

2. PBJT

Tabel di atas 4.14 menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0,3443809, nilai tersebut bertanda positif yang membuktikan bahwa arah hubungan antara PBJT dan PAD adalah searah. Artinya jika PBJT mengalami peningkatan maka PAD pun juga ikut meningkat. Selanjutnya, hasil pengujian statistik menunjukkan nilai Prob sebesar 0,000, yang berada jauh di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu, koefisien yang positif dan tingkat signifikan terpenuhi

sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yaitu PBJT berpengaruh terhadap PAD.

4.4.5 Uji Kelayakan Model

4.4.5.1 Uji F

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel PBB-P2 dan PBJT secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.14 diperoleh nilai $\text{Prob} > F = 0,0000$, nilai tersebut jauh lebih kecil dari 0,05 sehingga model regresi tersebut dinyatakan sangat layak. Hasil tersebut mengartikan bahwa PBB-P2 dan PBJT secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD. Selain itu, penerimaan kedua pajak tersebut menjadi instrumen dalam meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Walaupun, salah satu jenis pajak yaitu PBB-P2 secara individual tidak berpengaruh terhadap PAD, akan tetapi dengan adanya kedua pajak tersebut secara bersama-sama memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan PAD.

4.4.5.2 Uji R²

Uji R² digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan PBB-P2 dan PBJT dalam menjelaskan variabel dependen yaitu PAD. Dalam metode FEM, nilai yang digunakan sebagai acuan adalah *Within R-squared*. Tabel 4.14 diperoleh nilai *Within R-squared* sebesar 0,4431 (atau 44,31%). Hal ini menunjukkan bahwa variasi naik turun variabel PAD mampu dijelaskan oleh variabel PBB-P2 dan PBJT secara bersama-sama sebesar 44,31%. Sementara, sisanya sebesar 55,69% (100%-44,31%) dijelaskan oleh variabel atau faktor lain di luar penelitian yang tidak ikut disertakan oleh peneliti.

4.5 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

4.5.1 Tingkat Efektivitas PBB-P2 dan PBJT pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 – 2024

Tingkat efektivitas PBB-P2 dan PBJT pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2020-2024 secara umum berada pada kategori Sangat Efektif, dengan rata-rata untuk PBB-P2 sebesar 103% dan PBJT sebesar 106%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah mampu merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas yang tinggi mencerminkan bahwa proses pemungutan pajak daerah telah berjalan optimal sehingga target tercapai. Namun terdapat beberapa daerah yang tergolong cukup efektif dan kurang efektif, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kondisi wilayah dan kemampuan daerah dalam mencapai target.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan PBB-P2 dan PBJT menunjukkan bahwa kewenangan fiskal yang diberikan melalui kebijakan desentralisasi fiskal telah dimanfaatkan secara optimal. Desentralisasi fiskal memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui Teori *Stewardship* yang memandang pemerintah daerah sebagai *steward* yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan tingginya tingkat efektivitas PBB-P2 dan PBJT mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanahnya melalui pengelolaan pajak daerah yang mampu mencapai target penerimaan.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sachintania *et al.* (2021) yang juga menemukan tingkat efektivitas PBB-P2 masuk dalam kategori Sangat Efektif, dengan rata-rata selama lima tahun sebesar 112,3 % pada Kabupaten Bandung. Meskipun demikian, bahwa perbandingan ini memiliki keterbatasan, mengingat Kabupaten Bandung memiliki karakteristik geografis, struktur ekonomi, dan basis objek pajak yang berbeda dengan Jawa Tengah yang menjadi fokus penelitian ini. Kesamaan kategori tingkat efektivitas antar kedua penelitian tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa faktor pendorong di baliknya juga sama, sehingga perbandingan ini lebih bersifat gambaran umum bahwa fenomena efektivitas tinggi pada PBB-P2 turut ditemukan di daerah lain, bukan sebagai bukti generalisasi langsung antarwilayah.

4.5.2 Pengaruh PBB-P2 terhadap PAD

Mengacu pada perolehan hasil uji t menunjukkan bahwa PBB-P2 memiliki koefisien sebesar 0,0427752 dengan nilai Prob. sebesar 0,612 ($> 0,05$). Hasil tersebut mengartikan bahwa PBB-P2 tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Meskipun nilai koefisien menunjukkan arah hubungan positif, akan tetap secara statistik peningkatan penerimaan PBB-P2 belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020-2024. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor lain di luar PBB-P2 yang berperan dalam menentukan PAD. Mengingat terdapat berbagai sumber penerimaan daerah dalam komponen PAD.

Jika dilihat dari pembahasan sebelumnya, tingkat efektivitas PBB-P2 secara umum berada pada kategori sangat efektif. Sementara hasil uji statistik menunjukkan bahwa PBB-P2 tidak berpengaruh terhadap PAD. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan PBB-P2 belum tentu diikuti oleh peningkatan PAD secara signifikan. Efektivitas hanya menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan, bukan mengukur pengaruh perubahan penerimaan PBB-P2 terhadap perubahan PAD.

Tingginya efektivitas PBB-P2 yang secara konsisten melampaui target yaitu di atas 100%. Hal tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan *budgetary slack* yaitu penetapan target penerimaan yang sengaja direndahkan oleh pemerintah daerah, sehingga realisasi lebih mudah melampaui target yang ditetapkan. Selain itu berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara nominal kontribusi PBB-P2 terhadap total PAD relatif kecil yaitu hanya sebesar 11,15% dibandingkan dengan komponen PAD lainnya. Meskipun realisasi PBB-P2 meningkat secara konsisten dan masuk dalam kategori sangat efektif. Namun dampaknya belum signifikan secara statistik dalam menjelaskan perubahan PAD secara keseluruhan.

Selain itu, tidak berpengaruhnya PBB-P2 terhadap PAD juga dapat dijelaskan dari faktor mekanisme pemungutannya. PBB-P2 merupakan pajak yang dipungut dengan sistem *official assessment*, di mana besaran pajak dihitung oleh pemerintah daerah dan hanya dipungut satu kali dalam setahun. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP, yang pada dasarnya jarang mengalami penyesuaian nilai

dalam jangka waktu pendek. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan penerimaan PBB-P2 dari tahun ke tahun cenderung stabil dan tidak terlalu responsif terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga kurang cukup kuat untuk menjelaskan pengaruh terhadap PAD.

Dalam perspektif desentralisasi fiskal, pemerintah daerah telah memperoleh kewenangan untuk mengelola PBB-P2 sebagai salah satu sumber PAD. Namun hasil penelitian mencerminkan bahwa pelimpahan kewenangan tersebut belum mampu meningkatkan pengaruh PBB-P2 terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh adanya kewenangan pemungutan pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memperbarui basis data objek pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat sistem administrasi, dan mengoptimalkan pengawasan terhadap proses pemungutan.

Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa fenomena mengenai bahwa potensi penerimaan PBB-P2 belum sepenuhnya dapat dioptimalkan. Salah satu terjadi di Kota Semarang, di mana jumlah wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi peningkatan tersebut belum diikuti dengan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran sehingga masih terdapat potensi penerimaan yang belum terealisasi (informasi data berdasarkan Bapenda Kota Semarang). Selain itu, Pemerintah Kab. Pati melakukan penyesuaian NJOP setelah sekitar 14 tahun tidak dilakukan pembaruan sehingga NJOP kembali disesuaikan dengan kondisi pasar. Namun, kebijakan tersebut memunculkan penolakan masyarakat karena kenaikan tersebut dianggap terlalu tinggi. Oleh

karena itu, fenomena-fenomena tersebut menjadi gambaran bahwa masih terdapat kendala dalam pengelolaan PBB-P2 yang dapat menjadi tantangan dalam upaya optimalisasi penerimaan PBB-P2.

Dalam penelitian ini, pemerintah daerah telah berupaya mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 sebagai tercermin dari tingkat efektivitas yang relatif tinggi. Akan tetapi, upaya tersebut belum mampu memberikan pengaruh PBB-P2 terhadap PAD secara signifikan sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi *stewardship* masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan pajak daerah. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, kualitas basis data perpajakan, dan pengawasan dalam proses pemungutan. Oleh karena itu, perlunya pemerintah daerah memperkuat tata kelola perpajakan dengan cara mencari solusi dari tantangan yang menghambat optimalisasi penerimaan PBB-P2 agar amanahnya yang diberikan masyarakat untuk pemerintah dalam mengelola daerah dapat terjuwud secara optimal.

Hasil ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Siregar *et al.* (2023), di mana berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil PBB-P2 tidak berpengaruh terhadap PAD. Penelitian tersebut dilakukan pada periode 2020-2021 yang seluruhnya merupakan masa pandemi Covid-19, sehingga kondisi ekonomi yang tertekan saat itu turut menjadi faktor yang memengaruhi hasilnya. Pada penelitian ini juga mencakup periode pandemi tersebut sebagai bagian dari rentang waktu penelitian. Namun, karena periode penelitian ini lebih panjang yaitu 2020 hingga 2024 dan turut mencakup tiga tahun masa pemulihan ekonomi pasca pandemi, hasil yang tetap konsisten menunjukkan PBB-P2 tidak berpengaruh

signifikan terhadap PAD. Kondisi tersebut menunjukkan bukan hanya disebabkan oleh pandemi, akan tetapi terdapat faktor lain yaitu faktor struktural seperti kecilnya persentase kontribusi PBB-P2 dibandingkan total PAD serta karakteristik sistem pemungutan yang *official assessment* dan kurang responsif terhadap dinamika ekonomi.

4.5.3 Pengaruh PBJT terhadap PAD

Perolehan hasil uji t menunjukkan bahwa PBJT memiliki koefisien sebesar 0,3443809 dengan nilai Prob. sebesar 0, 000 ($< 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut, artinya PBJT berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020-2024, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Serta dapat ditarik kesimpulan setiap peningkatan penerimaan PBJT maka PAD pun akan mengalami peningkatan juga. Temuan ini mengindikasikan bahwa PBJT merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mampu memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan kapasitas keuangan daerah terutama dalam pembentukan PAD. Hal tersebut dapat terjadi karena objek PBJT berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga penerimaannya cenderung meningkat seiring pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Selain berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat, pengaruh PBJT terhadap PAD juga dapat dijelaskan dari mekanisme pemungutannya. PBJT dipungut dengan sistem *self assessment*, di mana pemungutan dilakukan oleh pelaku usaha setiap kali ketika terjadi transaksi berdasarkan aktivitas konsumsi masyarakat secara langsung. Karakteristik tersebut menyebabkan penerimaan PBJT

lebih fluktuatif dan sekaligus lebih responsif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga dapat menjelaskan perubahan peningkatan PAD dari waktu ke waktu secara signifikan.

Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PBJT sebagai salah satu sumber PAD sesuai dengan potensi wilayah tersebut. Hal tersebut dibuktikan melalui pengelolaan PBJT yang efektif sehingga penerimaan daerah meningkat yang menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan PAD. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola PBJT menunjukkan bahwa perannya sebagai *steward* yang memiliki tanggung jawab mengelola sumber daya secara efektif untuk kepentingan masyarakat terpenuhi. Tidak hanya keberhasilan dalam mencapai target penerimaan yang ditunjukkan oleh kategori sangat efektif, melainkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan penerimaan PBJT sehingga memberikan pengaruh positif terhadap PAD.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pandu (2023), Siregar *et al.* (2023), dan Wulandari *et al.* (2023) menunjukkan bahwa PBJT atas tenaga listrik dan jasa makanan dan minuman yang merupakan komponen pembentuk PBJT berpengaruh positif terhadap PAD. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa penerimaan yang berasal dari aktivitas konsumsi memiliki peranan penting dalam meningkatkan PAD. Walaupun, penelitian terdahulu menguji komponen pembentuk PBJT secara terpisah, hasil yang diperoleh tetap menunjukkan arah hubungan yang konsisten.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa penerimaan PBJT merupakan salah satu faktor mendukung peningkatan PAD.